

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota merupakan tempat dimana ketidaksetaraan lebih kuat dan jika tidak dikelola dengan baik, efek negatifnya dapat melampaui yang positif. Daerah perkotaan perlu mengelola perkembangan mereka, mendukung daya saing ekonomi meningkatkan kohesi sosial, lingkungan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Monzon, 2014). Pernyataan tersebut sejalan dengan pengertian Kota Inklusif menurut Commentary (2013).

Pembahasan mengenai kota inklusif juga mencakup keselamatan wanita (Mackness, 2013), tempat tinggal/perumahan (Charbonneau, 2016), air bersih (Ogwueleka & Diala, 2018) dan hal lainnya yang termasuk dalam kehidupan yang layak dalam cakupan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Tema ini ternyata sudah banyak digunakan dan ada sejumlah kajian tentang Kota Inklusif di berbagai penjuru dunia (Maftuhin, 2017). Berbeda dengan pembahasan kota inklusif di Indonesia.

Kota Inklusif di Indonesia lebih banyak membahas mengenai penyandang disabilitas, ini sepemikiran dengan (Maftuhin, 2017) dari sekian banyak studi tentang kota inklusif tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas kajian kota inklusif tidak terkait secara khusus dengan isu-isu difabel. Padahal, konsep kota inklusif di Indonesia selalu terkait dengan pemenuhan hak-hak difabel sebagaimana konsep Pendidikan inklusif juga lebih terkait dengan hak-hak difabel, bukan inklusivitas ras, etnis, atau agama. Hal ini di perkuat dengan instrument penilaian

kota inklusif yang juga lebih mengarah pada penyandang disabilitas (UNESCO, 2017).

Difabel memang memiliki prioritasnya sendiri, apalagi dengan dicanangkannya Kota Pintar beberapa tahun belakangan. Disabilitasnya juga mengharapkan kesetaraan yang sama sebagaimana diperoleh oleh kebanyakan orang. Kota inklusif merupakan bagian dari Kota Pintar. Kota Pintar memberikan kemudahan dengan memanfaatkan teknologi. Kota Inklusif kemudian memberikan fasilitas yang sama untuk semua kalangan disabilitas, orang usia lanjut, wanita, anak-anak dan masyarakat miskin atau disebut afirmatif gender, karena semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan sosial.

Pemerintah daerah harus berusaha membangun kota untuk semua orang, terutama hal yang mendasar seperti kehidupan yang layak dan kota layak huni bagi semua warga, baik yang mendiami wilayah tersebut maupun warga pendatang karena pemeritahan yang baik adalah pemerintahan yang bisa menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ada.

Neirottia, et.all., (2014); Nam and Pardo, (2011); Washburn and Sindhu (2010) seperti yang dikutip oleh Novianti dan Syahid (2017), Akibatnya kota semakin menghadapi tantangan yang luar biasa besar dan kompleks terkait dengan fasilitas yang diberikan kepada warganya. Kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, sehingga warga kota merasakan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan tinggal di kotanya harus dipenuhi oleh pengelola kota.

Sejak beberapa tahun terakhir, ide-ide terkait inklusi mulai marak di Indonesia dan di berbagai bidang. Dalam konteks ini, bidang pendidikan adalah yang terdepan dengan konsep “pendidikan inklusif”-nya. Dari aspek kebijakan publik, pendidikan inklusif sudah mendapatkan payung hukum yang kuat mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan telah dilaksanakan secara nyata di lapangan oleh banyak daerah di Indonesia. Selain pendidikan, sektor lainnya adalah “kawasan inklusif”. Dalam cakupan konsep “kawasan inklusif” ini termasuk konsep-konsep semisal “desa inklusi” (‘Diskusi Desa Inklusi dalam Jagongan Media Rakyat 2016’, 2016), ”kecamatan inklusi” (‘Peringati Hari Disabilitas Internasional, Pemkot Canangkan Empat Kecamatan Inklusi’, 2015), hingga “kota inklusi” (‘Yogyakarta Bertekad Jadi Kota Inklusi’, 2016). (Maftuhin, 2017).

Mengejar kebahagiaan, persamaan dan rasa yang lebih besar pemberdayaan mengenai pembentukan dan penggunaan ruang publik, dan pemahaman tentang hak, lebih terintegrasi secara penuh ke dalam kebijakan arus utama, juga akan menjadi fitur. Bangunan Kota Inklusif bertujuan untuk memberikan ide, studi kasus dan inspirasi mempromosikan realisasi visi kota yang aman dan inklusif (Mackness, 2013).

Kota Inklusi telah termasuk dalam agenda dunia perubahan berkelanjutan untuk merubah masa depan kemudian Persatuan Bangsa-Bangsa menjadikannya agenda *The Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dilakukan untuk kepentingan bersama dan didalamnya ada 17 tujuan, seperti yang tertulis dalam sustainabledevelopment.un.org

1. *End poverty in all its forms everywhere* (mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana-mana)
2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture* (mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan panga dan eningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan)
3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages* (Pastikan hidup sehat dan tingkatan kesejahteraan untuk semua usia)
4. *Ensure inclusive and equitable education and promote lifelong learning opportunities for all* (Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas)
5. *Achieve gender equality and empower all women and girls* (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan)
6. *Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all* (Pastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua)
7. *Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all* (Pastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua)
8. *Promote sustained inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all* (Menggalakkan

pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang)

9. *Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation* (Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi)
10. *Reduce inequality within and among countries* (Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara)
11. *Make cities and human settlements inclusive safe resilient and sustainable* (Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh)
12. *Ensure sustainable consumption and production patterns* (Pastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan)
13. *Take urgent action to combat climate change and its impacts* (Ambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya)
14. *Conserve and sustainably use the oceans seas and marine resources for sustainable development* (Menghemat dan secara berkelanjutan menggunakan lautan laut dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan)
15. *Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss* (Lindungi, pulihkan,

dan promosikan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, kelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan hentikan dan cadangkan degradasi lahan dan hentikan hilangnya keanekaragaman hayati)

16. *Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels* (Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif di semua strata)

17. *Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development* (Perkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan)

Enam dari tujuh belas tujuan yang ada yaitu tujuan empat, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dan enam belas dari SDGs tersebut menjadi pembangunan berkelanjutan membahas inklusi sosial, sementara tujuan lainnya menjadi pendukung dari inklusi sosial (UNESCO, 2017). Harapan masa depan yang dilakukan untuk perubahan berkelanjutan ini bisa terpenuhi pada tahun 2030 sebagaimana yang di agendakan walaupun pasti banyak kendala yang dihadapi apalagi untuk mewujudkan Kota Inklusi tidak semudah yang di bayangkan karena pasti ada pertentangan di berbagai kalangan.

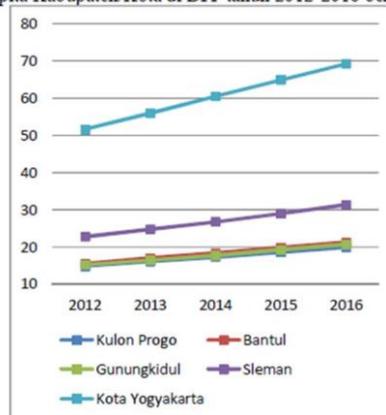
Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa ada beberapa syarat kota agar tidak menjadi kota gagal atau menjadi kota yang sedang membunuh dirinya sendiri. Pertama, pemerintahan yang terbuka atau demokratis. Kedua, pemerintahan yang responsive. Pemerintah harus mempunyai indra keenam yaitu kemampuan merespon keadaan secara tepat dan juga dapat mengantisipasi kejadian-kejadian buruk di masa yang akan datang dengan program-program yang inovatif, dan ketiga, pemerintahan yang kolaboratif—yaitu pemerintah yang ringan kaki dan tangan dalam bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka memenuhi kebutuhan terbaik warga masyarakatnya (Effendi, 2018).

Beberapa tahun belakangan Indonesia mulai mencanangkan *Smart City* untuk dikembangkan, tetapi tidak semua pemerintah daerah siap untuk menjalankan *Smart City* ini. Ada saja kendala yang masih dihadapi dari pemerintah yang belum siap, masyarakat yang kurang mengerti dan ketersediaan dari *Smart City* itu sendiri. Semenjak bergulirnya isu *Smart City*, pemerintah yang kemudian telah memahami *Smart City* dan tututan lebih dari masyarakat yang telah mengerti makna dari *Smart City*, mengharapkan sesuatu yang bukan hanya bisa digunakan untuk pemerintah dan masyarakat secara umum tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan kekhususan tersendiri.

Kekhususan tidak hanya merujuk kepada satu kaum saja, kekhususan di sini bisa jadi pada kemudahan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Persyaratan dasar proses pembuatan kota termasuk kemampuan untuk beradaptasi dengan sosial dan perubahan ekonomi (Haferburg, 2017).

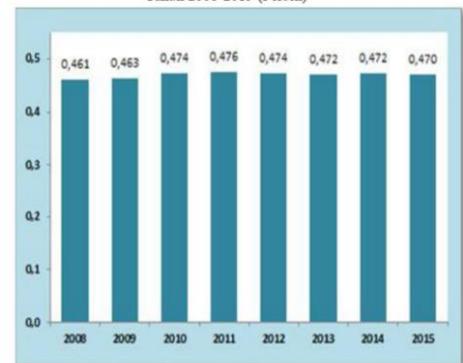
Yogyakarta merupakan daerah dengan kesenjangan tertinggi di Indonesia, disisi lain Yogyakarta juga merupakan kota yang paling bahagia di Indonesia.

Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di DIY tahun 2012-2016 berdasar ADHB



Sumber : BPS, Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kot

Perkembangan Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson) DIY, Tahun 2008-2015 (Persen)



Gambar 1.1
Pendapatan Perkapita
Sumber : Prawono, 2017

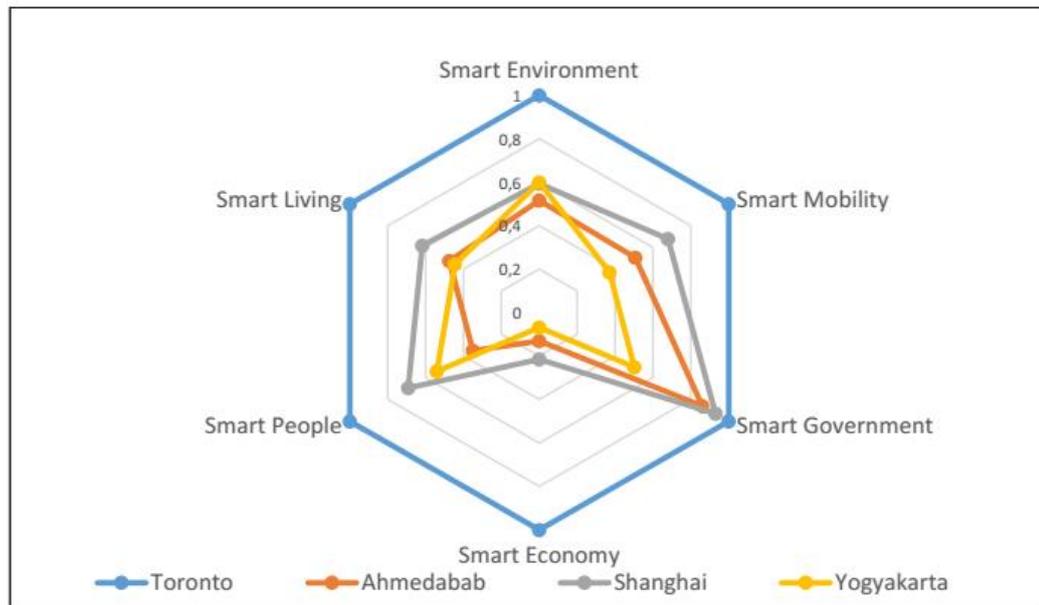
Kesenjangan yang terjadi akibat pembangunan di Yogyakarta yang sangat cepat tetapi hanya bisa di manfaatkan oleh golongan menengah ke atas dan warga miskin yang ada tidak bisa memanfaatkan pembangunan karena tidak memiliki keterampilan, oleh sebab itu Gubernur DIY Sri Sultan HB X mencanangkan desa mandiri berbudaya untuk mendongkrang perekonomian masyarakat miskin. Desa mandiri berbudaya bisa mendapatkan dana bantuan dari Dana Keistimewaan Yogyakarta, Kota Budaya.

Pada jurnal Maftuhin (2017), Kota Solo mengarahkan Kota Inklusifnya menjadi Kota Pendidikan Inklusif pada tahun 2013. Pemerintah Kota Yogyakarta juga mulai menjalankan Kota Inklusif dengan tidak melepaskan karakteristik Kota Yogyakarta sendiri yaitu Kota Budaya dan Kota Pendidikan.

Yogyakarta memiliki kekayaan budaya (*cultural capital*) yang tak lekang oleh perubahan jaman, modal sosial (*social capital*) dan kecerdasan lokal (*local wisdoms*) serta modal insani (*human capital*), Kreatif dan inovatif, Egaliter dan toleransi tinggi, Jogja juga dikenal sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali (*liveable city*) disamping itu Yogyakarta juga sering dianggap sebagai Indonesia mini karena mahasiswa datang dari penjuru nusantara dengan berbagai adat istiadat mereka yang dapat menyatu dengan budaya masyarakat Jogja yang memang dikenal ramah dan terbuka kepada pendatang serta keberadaan Sultan sebagai panutan dan dinamika politik yang relatif stabil (Puspitawati, 2016).

Kebudayaan di Yogyakarta bisa saja tergerus diakibatkan permasalahan-permasalahan yang muncul, sebab itulah Sultan HB X dalam diskusi Panel Kebudayaan 2013 menempatkan aspek budaya pada posisi marginal dan mengutamakan hal itu di kawasan Kota Yogyakarta yang menjadi pusat DI Yogyakarta, pusat kebudayaan dan tempat berkumpul para pendatang.

Penelitian yang dilakukan Tim PSPPR UGM yang membandingkan Hasil pengukuran menggunakan *Boyd Cohen Smart City Wheel* 4 kota, yaitu Toronto, Ahmedabad, Shanghai dan Yogyakarta membandingkan penggunaan *Smart City* di kota-kota tersebut, tidak mengikutkan unsur perbandingan budaya didalamnya dan didapati hasil sebagai berikut:



Gambar 1.2
 Hasil Pengukuran Menggunakan *Boyd Cohen Smart City Wheel*
 Sumber : Tim PSPPR UGM, 2016

Kota Yogyakarta lebih unggul dari Ahmedabab dan Shanghai dalam Smart Environment, lebih ungu dari Ahmedabab dalam Smart People tetapi kalah dari Shanghai, kemudian di sisi yang lain Kota Yogyakarta kalah di dibandingkan kedua kota tersebut walalupun pada Smart Living Kota Yogyakarta dan Ahmedabab berbeda sedikit.

Pemerintah Kota di Indonesia tidak semuanya siap untuk menjadi Kota Inklusi, dari 99 Pemerintahan Kota yang menyatakan siap untuk menjadi Kota Inklusi pada tahun 2020 saat ini hanya ada 8 dan Yogyakarta adalah salah satunya.

Kota Yogyakarta mulai menjalankan Kota Inklusi tahun 2015. Akhir tahun 2015 ada 4 kecamatan yang ditujuk untuk menjadi Kecamatan percontohan, Surat Keputusan dikeluarkan pada tahun 2016. Setahun kemudian pada tahun 2017 Pemerintah Kota Yogyakarta menambah lagi 2 Kecamatan percontohan.

Di Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2015 ada 4 Kecamatan yang mulai menjadi rintisan kecamatan inklusi yaitu Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Gondokusuman. Ke empat Kecamatan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 339 Tahun 2016. Tahun 2017 ada penambahan 2 Kecamatan percontohan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2017, Kecamatan Kraton dan Kecamatan Jetis. Tahun 2018 ada 2 Kecamatan lagi yang di tambahkan yaitu Kecamatan Matrijeron dan Kecamatan Gedonglengen. Tiap tahunnya akan di tambah dua Kecamatan disesuaikan dengan stakeholder yang bekerjasama untuk mewujudkan Kota Inlusif di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta merupakan kota budaya jadi inovasi baru yang dikembangkan harus tetap mengikutkan identitas yang ada yaitu kebudayaan. Sebuah tantangan sendiri untuk mengarahkan Kota Inklusi berlandaskan kebudayaan. Ditambah tidak mengesampikan kebutuhan afirmatif gender lainnya. Perbaikan sangat dibutuhkan di seluruh bagian kota, sekarang pembuatan inklusif baru terjadi pada tahap Pendidikan belum pada fasilitas lainnya. Gedung Jalan masih belum pada tahap Kota Inklusi.

Pemerintah Kota Yogyakarta bersama 8 Kecamatan yang ditunjuk untuk menjadi Kecamatan percontohan didukung dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah usaha Pemeintah Kota Yogyakarta berusaha mewujudkan Kota Inklusi yang ramah bagi semua.

Pembahasan mengenai Kota Inklusi di Indonesia lebih banyak kepada penyandang disabilitas. Instrumen Penilaian Kota Inklusi yang diterbitkan UNESCO juga banyak diarahkan untuk disabilitas. Hukum di Indonesia untuk pembangunan Kota Inklusi juga demikian, lebih condong untuk memenuhi hak dan mendukung disabilitas. Padahal Kota Inklusi tidak hanya menitik beratkan pada disabilitas, tetapi juga untuk wanita, lansia, anak, dan keluarga miskin.

Atas dasar itulah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah merencanakan pengucuran dana afirmatif di 14 kecamatan. Sebanyak 45 kelurahan, akan memperoleh dana afirmatif masing-masing Rp 20 juta per kelurahan. Dana itu digunakan untuk kegiatan rintisan kota inklusi, yakni untuk lansia Rp 5 juta, perempuan Rp 5 juta, dan keluarga miskin Rp 10 juta. Tidak hanya itu. Masih ada tambahan untuk kegiatan Jam Belajar Masyarakat (JBM) per Rukun Warga (RW) dialokasikan dana Rp 3 juta. “Untuk mewujudkan Yogyakarta Kota Inklusi maka diprioritaskan lima afirmatif gender yang harus intensif dikelola Forum Kecamatan Inklusif (FKI). Kelima unsur itu adalah anak, perempuan, lansia, disabilitas, dan keluarga miskin (Aksi Menuju Yogyakarta Kota Inklusi, 2018).

Kota Inklusi membutuhkan pemimpin yang menginspirasi perubahan, dan hanya melakukan hal-hal yang membuat kota mereka lebih baik untuk semua orang (Lindsey, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, penulis bisa menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta dalam perspektif *Smart City*?
2. Siapa aktor/*stakeholder* yang ikut berperan untuk mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah mewujudkan Kota Inklusif bagi semua orang di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui siapa aktor/*stakeholder* yang ikut berperan untuk mewujudkan Kota Inklusif di Kota Yogyakarta.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan bagi masyarakat Kota Yogyakarta tentang fasilitas dan apa saja yang di sediakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kota yang inklusif
2. Berdasarkan penelitian yang nantinya akan dilakukan, Pemerintah Daerah bisa menerima masukan dalam kebijakan yang dibuat untuk mewujudkan kota yang inklusif.